

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka didapatlah beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pada aspek musyawarah, sesuai teori Kuntowijoyo dalam penyusunan APBK telah diterapkan di Kampung Sidoarjo. Namun, musyawarah yang terjadi di Kampung Sidoarjo mengalami kendala. Sebagian masyarakat yang seharusnya menjadi peserta penyusunan APBK tidak diikutsertakan karna kendala yang terjadi masyarakat tidak mendapat undangan dari aparatur kampung. Tetapi, musyawarah dalam penyusunan APBK sudah berjalan dengan baik dan mencapai mufakat serta disetujui oleh peserta musyawarah.
2. Dilihat dari aspek partisipasi dalam penyusunan dan pembahasan APBK memang sudah dilaksanakan tetapi penerapan prinsip-prinsip demokrasi yaitu partisipasi belum optimal diterapkan dalam pembahasan APBK. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan APBK masih banyak masyarakat yang tidak hadir dan ada yang hadir tetapi hanya sebagai penonton atau hanya datang duduk diam.
3. Aspek kerjasama dalam prinsip-prinsip demokrasi di Kampung Sidoarjo belum berjalan dengan lancar, dikarenakan komunikasi dan koordinasi antara aparatur kampung dengan tokoh masyarakat belum

optimal. Aparatur kampung kurang mensosialisasikan bahwa akan ada penyusunan APBK di Kampung Sidoarjo sehingga tokoh masyarakat tidak dapat ikut berpartisipasi dalam penyusunan APBK karna tidak mendapat undangan.

4. Faktor-faktor penyebab kurang optimalnya demokratisasi berdasarkan kontrol akhir dalam pembuatan Peraturan Kampung Sidoarjo tentang APBK ini dikarenakan Pemerintah Kampung yang masih memisahkan peranan masyarakat dari hak masyarakat untuk mengawasi jalannya musyawarah sampai penetapan. Tentu saja tanpa kontrol dari masyarakat keputusan yang diambil pun cenderung non demokratis

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam melakukan musyawarah untuk penyusunan APBK di Kampung Sidoarjo koordinasi dalam penyampaian surat undangan kepada tokoh-tokoh masyarakat harus ditinjau kembali agar para tokoh masyarakat dapat ikut serta dalam penyusunan APBK sehingga Peraturan Kampung yang ditetapkan nantinya merupakan Peraturan Kampung yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi
2. Sebaiknya dalam proses penyusunan peraturan Kampung sidoarjo tentang APBK para aparatur Kampung seharusnya mensosialisasikan terlebih dahulu tentang APBK di Kampung Sidoarjo sehingga dapat

meminimalisirkan keadaan peserta yang datang dan hanya diam ketika musyawarah terjadi. Selain itu aparaturnya Kampung Sidoarjo juga harus lebih teliti terhadap memberi undangan kepada tokoh masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi.

3. Sebaiknya kerjasama antara Pemerintah Kampung dan BPK dengan kepala dusun dan tokoh masyarakat lebih ditingkatkan agar penyampaian undangan benar-benar disampaikan sehingga tokoh masyarakat bisa ikut serta dalam pembuatan APBK.
4. Seharusnya pemerintah kampung harus memberikan peran kepada masyarakat untuk kontrol akhir dalam penetapan APBK sehingga APBK yang dibuatpun benar-benar hasil dari musyawarah. Masyarakat pun harus benar-benar mengawasi jalannya APBK sehingga tidak terjadi tindakan penyelewengan ataupun tindak penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah kampung itu sendiri.